**PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI BERAS OLEH PERUSAHAAN
UMUM BADAN URUSAN LOGISTIK SUB DIVISI REGIONAL
WILAYAH IV BANYUMAS DENGAN USAHA
DAGANG AL FALAH**

Oleh: Nadia Yolanda

Pembimbing I: Dr. Maryati Bachtiar, S.H.,M.Kn

Pembimbing II: Dasrol, S.H.,M.H

Alamat: Jln. Sariamin No. 43 Kelurahan Cinta Raja Kec. Sail Pekanbaru

Email / Telepon : nadyol21@yahoo.com / 0812-7524-3778

ABSTRACT

Banyumas State Logistics Agency has implemented a Rice Sale and Purchase Agreement (PJB) with its partner, the Al Falah Trade Business. One form of negligence or broken promises in the implementation of the agreement that can be said to be detrimental to one party is the problem of default. The purpose of writing this thesis is to find out the factors that cause the occurrence of defaults carried out by the Al Falah Trade Business to the Banyumas Bulog Corporation and efforts to resolve the default in the implementation of the sale and purchase agreement carried out by the Banyumas Bulog Corporation with the Al Falah Trade Business.

This research is a sociological or empirical research which is a type of research that uses the assumptions of the community in searching for facts that occur in the field to answer an existing problem. This research was carried out in the area of the General Enterprise of the Regional Logistics Agency, Regional IV, Banyumas. While the population and sample are parties related to the problem examined in this study, the source of the data used, primary data, secondary data, and tertiary data. Data collection techniques in this study were interviews and literature review.

From the results of the research that the author did, it can be concluded, firstly the implementation of the sale and purchase agreement of rice between the Banyumas Bulog Public Corporation and its partners namely the Al Falah Trade Business stated in the form of an agreement referring to Presidential Instruction Number 5 of 2015 Concerning the Policy for Procurement of Grain or Rice and Rice Distribution by Government. In the rice sale and purchase agreement, there are problems of defaults carried out by the Al Falah Trade Business to the Banyumas Bulog Corporation, such as not delivering the rice supply within the period specified in the agreement, the delay in delivery of the rice in an additional period, the submitted rice is not in accordance with the quantity and quality stipulated in the agreement.

Keywords : Rice Buy And Sell Agreement – Public Corporation Logistics Agency

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Beras yang merupakan hasil pengolahan dari padi adalah sumber karbohidrat tertinggi dibandingkan dengan jenis pangan lainnya, maka tidak heran beras paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia sebagai makanan pokok. Jumlah penduduk di Indonesia yang cukup besar mengakibatkan keperluan penyediaan pangan di tingkat nasional maupun regional terus meningkat. Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap pangan dan meratakan pemenuhan akan pangan terutama beras maka pemerintah membentuk suatu badan usaha yang berbentuk Perusahaan Umum yaitu Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik atau disingkat juga dengan Perum Bulog.

Perum Bulog merupakan perusahaan umum milik negara yang bergerak dibidang logistik pangan. Cakupan bisnis perusahaan ini meliputi usaha logistik atau pergudangan, survei dan pemberantasan hama, penyediaan karung plastik, usaha angkutan, perdagangan komoditi pangan dan usaha eceran. Perum Bulog merupakan hasil peralihan kelembagaan atau perubahan status hukum Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) Bulog menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam bentuk Perusahaan Umum. Perum Bulog didirikan berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 114/Kep/1967 tanggal 10 Mei 1967, terakhir dengan Keputusan Presiden No. 103 tahun 2001 tanggal 13 September 2001.¹

Dalam rangka menjamin ketersediaan stok pangan nasional

terutama beras, Perum Bulog menjalin hubungan dengan beberapa mitra kerja bisnisnya. Kemitraan merupakan satu sistem yang saling berinteraksi dengan batasan-batasan dan aturan-aturan yang telah disepakati antar pihak yang bermitra. Kemitraan adalah hubungan pembeli dengan pemasok dalam suatu kerja sama yang saling mempercayai dengan kata lain kerja sama yang saling menguntungkan. Mitra kerja adalah suatu unit usaha baik berupa badan usaha atau usaha perseorangan dan kelompok tani atau gabungan kelompok tani (Poktan atau Gapoktan) yang memenuhi syarat sebagai pusat pengolahan padi terpadu dan bersedia melakukan kerjasama dengan Perum Bulog untuk selanjutnya diolah menjadi beras berkualitas. Salah satu mitra kerja yang melakukan perjanjian jual beli beras dengan Perum Bulog Banyumas adalah Usaha Dagang Al Falah di tahun 2017.

Suatu perjanjian harus dianggap lahir pada waktu tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak. Orang yang hendak membuat perjanjian harus menyatakan kehendaknya dan kesediaannya untuk mengikatkan dirinya. Pernyataan kedua belah pihak bertemu dan sepakat penting untuk menunjukkan telah lahirnya suatu perjanjian. Suatu perjanjian baik secara tertulis maupun tidak tertulis dapat merupakan hasil dari kesepakatan bersama yang mengikat karena perjanjian yang menjadi dasarnya.²

Dalam perjanjian atau kontrak bisa saja timbul perselisihan. Hal-hal yang mengakibatkan timbulnya perselisihan antara lain karena:

1. Penafsiran yang berbeda tentang perjanjian.

² Gardner, Union President Wesley A. Pummill. "Relationship of this Agreement To Bureau Policies, Regulations, And, Practices". Artikel pada Jurnal Westlaw Arbitrator's Awards, The Federal Correctional Complex (FCC) in Terre Haute, Indiana, 2012.

¹ http://bumn.go.id/upload/download_img/file_download/, diakses, tanggal, 2 Januari 2018.

2. Pokok perselisihan belum diatur dalam perjanjian.
3. Salah satu pihak dan atau kedua belah pihak melakukan wanprestasi.³

Dalam hubungan yang prestasi, Usaha Dagang Al Falah berkewajiban mengolah sejumlah beras dan menjual sesuai dengan yang diperjanjikan, dan kewajiban Perum Bulog selain menjamin akan membeli beras tersebut juga membayar sesuai dengan harga yang diperjanjikan. Permasalahan yang muncul di antara Perum Bulog Banyumas dengan Usaha Dagang Al Falah yaitu tidak diantarnya pasokan beras, jumlahnya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, dan terlambat untuk menyertokan beras.⁴

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas ada beberapa hal yang menjadi permasalahan untuk dibahas dalam penulisan skripsi ini. Permasalahan-permasalahan tersebut adalah:

1. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli beras oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional Wilayah IV Banyumas dengan Usaha Dagang Al Falah?
2. Bagaimana upaya penyelesaian terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli beras yang dilakukan oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional Wilayah IV Banyumas dengan Usaha Dagang Al Falah?

³ Nana P. Jehani, et.al, *50 Contoh Perjanjian (Kontrak)*, Forum Sahabat, Jakarta : 2008, hlm. 234.

⁴ Wawancara dengan Ibu Dewi Rahmawati, Kepala Seksi Pengadaan Beras, Hari Kamis, Tanggal 20 Juni, 2019, bertempat di Kantor Perum Bulog Banyumas.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mencari pemahaman yang jelas dan benar mengenai permasalahan yang telah dirumuskan:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli beras oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional Wilayah IV Banyumas dengan Usaha Dagang Al Falah.
2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli beras antara Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional Wilayah IV Banyumas dengan Usaha Dagang Al Falah.

D. Kerangka Teori

Teori diartikan sebagai suatu sistem yang berisikan proposisi-proposisi yang telah diuji kebenarannya. Apabila berpedoman kepada teori maka seorang ilmuwan akan dapat menjelaskan, aneka macam gejala sosial yang dihadapinya walaupun hal ini tidak selalu berarti adanya pemecahan terhadap masalah yang dihadapi. Teori menggambarkan keteraturan atau hubungan dari gejala-gejala yang tidak berubah dibawah kondisi tertentu tanpa pengecualian. Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan menjelaskan segala yang dihadapinya. Adapun teori yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini diantaranya:

1. Teori Kontrak

Roscoe Pound dalam bukunya yang berjudul tentang *An Introduction to the Philosophy of Law* menyebutkan kontrak sebagai kontrak antara subjek satu dengan subjek lainnya. Pound mengatakan "Sebagian yang penting dari harta benda seseorang adalah terdiri dari

keuntungan yang dijanjikan oleh orang lain bahwa akan disediakan atau akan diserahkan; terdiri dari tuntutan terhadap keuntungan yang dijanjikan, yang boleh diajukannya, bukan terhadap dunia pada umumnya, melainkan terhadap perseorangan tertentu”.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya.⁵

D. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas dalam penelitian ini, disamping perlunya kerangka teoritis juga diperlukan kerangka konseptual yang merumuskan definisi-definisi dari peristilahan yang digunakan sehubungan dengan judul yang diangkat, yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan dianggap siap.⁶
2. Perjanjian (*overeenkomst*) atau kontrak, menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sesuatu perbuatan dimana seseorang atau beberapa orang mengikatkan dirinya kepada seorang atau beberapa orang lain.⁷

⁵ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

⁶ <http://digilib.unila.ac.id/4718/11/BAB%2011.pdf>, diakses, tanggal, 2 Agustus 2018.

⁷ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta : 2006, hlm. 25.

3. Jual Beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak lain untuk membayar harga yang dijanjikan.⁸ (Pasal 1457 KUHPerduta)
4. Beras adalah padi yang telah terkelupas kulitnya (yang menjadi nasi setelah ditanak).⁹
5. Perusahaan Umum (Perum) BULOG yang selanjutnya disebut Perum Bulog adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, yang menyelenggarakan usaha

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian empiris atau sosiologis hukum yaitu melakukan pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum dan fakta-fakta di dalam suatu masyarakat, badan hukum, atau badan pemerintahan.¹⁰ Sedangkan sifat penelitian adalah deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran secara rinci dan jelas tentang penerapan asas iktikad baik dalam perjanjian jual beli beras antara Perum Bulog Banyumas dengan Usaha Dagang Al Falah.

2. Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional

⁸ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Depok : 2018, hlm. 126.

⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta : 2001, hlm. 198.

¹⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta : 2015, hlm. 105.

Wilayah IV Banyumas Jawa Tengah.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri-ciri yang sama, populasi dapat berupa orang, benda (hidup dan mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Adapun yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah Seksi Pengadaan Beras di Perum Bulog Banyumas yaitu Kepala Seksi Pengadaan Beras bernama Ibu Dewi Rakhmawati dan Staf Pengadaan Beras yang bernama Rahma Fiqri Nur Ihsani. Kemudian, Pengurus Usaha Dagang Al Falah sebagai salah satu mitra kerja yang melakukan wanprestasi terhadap Perum Bulog Banyumas pada tahun 2017.

4. Analisis Data

Analisis data dalam penulisan ini digunakan data kualitatif, yaitu suatu analisis data secara jelas, serta diuraikan dalam bentuk kalimat sehingga diperoleh gambaran yang jelas yang berhubungan dengan skripsi.¹¹ Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berpikir deduktif. Metode berpikir deduktif ialah cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus, sehingga penulis dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

¹¹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Yogyakarta: 1983, hlm. 34.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kontrak

1. Pengertian Kontrak

Istilah kontrak berasal dari bahasa Inggris, yaitu *contracts* sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *overeenkomst*, yang juga bermakna sama dengan kontrak yaitu perjanjian.¹² Kontrak dapat disamaartikan dengan perjanjian, hal mendasar perbedaan pengertian kontrak dan perjanjian yaitu kontrak merupakan suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis, sedangkan perjanjian merupakan semua bentuk hubungan antara dua pihak dimana pihak yang satu berjanji kepada pihak yang lain untuk melakukan sesuatu hal. Perjanjian tidak membedakan apakah perjanjian tersebut dibuat tertulis maupun tidak, sehingga kontrak dapat diartikan sebagai perjanjian secara sempit, yaitu hanya yang berbentuk tertulis. Hal ini memberikan arti bahwa kontrak dapat disamakan dengan perjanjian.

Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana pihak yang satu berjanji kepada pihak yang lain untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu hal, sehingga pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut terikat oleh isi perjanjian yang mereka buat.¹³ Perjanjian itu berlaku sebagai suatu undang-undang bagi pihak yang saling mengikatkan diri, serta mengakibatkan timbulnya suatu hubungan antara dua orang atau dua pihak tersebut yang dinamakan perikatan.¹⁴

¹² Kamus Hukum Belanda-Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta : 2005, hlm. 375.

¹³ Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta: 2013, hlm. 107.

¹⁴ Novina Sri Indiraharti, "*Aspek Keabsahan Perjanjian dalam Hukum Kontrak (Suatu*

2. Syarat Sah Kontrak

Pasal 1320 KUHPerdota menyatakan untuh sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan diri (*agreement/consensus*), kecakapan (*capacity*), hal yang tertentu (*certainty of terms*), dan sebab yang halal (*consideration*). Keempat syarat ini merupakan syarat pokok bagi setiap perjanjian. Artinya, setiap perjanjian harus memenuhi keempat syarat ini bila ingin menjadi perjanjian yang sah. Semuanya merupakan syarat pokok bagi setiap perjanjian dan selain itu terdapat juga syarat tambahan bagi perjanjian tertentu saja.

3. Unsur-Unsur Kontrak

a. Adanya Kaidah Hukum

Kaidah hukum terbagi menjadi dua yaitu tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum kontrak tertulis adalah kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat dan yurisprudensi, sedangkan kaidah hukum yang tidak tertulis adalah kaidah hukum yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat.

b. Subjek Hukum

Subjek hukum diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Subjek perjanjian adalah pihak kreditur yang berhak atas prestasi dan pihak debitur yang berkewajiban atas prestasi. Kreditur adalah orang yang berpiutang, sedangkan debitur adalah orang yang berutang.

4. Bentuk-Bentuk Kontrak

Bentuk kontrak dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu perjanjian tertulis dan perjanjian lisan. Ada tiga bentuk perjanjian tertulis,

sebagaimana dikemukakan berikut ini:

1. Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja.
2. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak.
3. Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notariel.¹⁵

5. Asas-Asas Kontrak

Menurut Paul Scholten, asas hukum adalah pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum, masing-masing dirumuskan dalam aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang berkenaan dengan ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individu yang dapat dipandang sebagai penjabarannya.¹⁶

6. Wanprestasi

Dalam perjanjian obligatoir, senantiasa terdapat kewajiban yang harus dipenuhi oleh salah satu pihak dan kewajiban tersebut merupakan hak yang pemenuhannya dapat dituntut oleh pihak lain. Pihak yang berhak menuntut disebut sebagai pihak berpiutang atau kreditur dan pihak yang wajib memenuhi tuntutan disebut sebagai pihak berhutang atau debitur, sebaliknya sesuatu yang dapat dituntut disebut dengan istilah prestasi.

B. Tinjauan Umum Tentang Kontrak Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Istilah perjanjian jual beli berasal dari terjemahan *contract of sale*. Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal

Perbandingan Antara Indonesia dan Korea Selatan)". Artikel Pada Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 4 No. 1 Tahun 2014, hlm. 18.

¹⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung : 2010, hlm. 86-88.

¹⁶ J.J.H. Bruggink dan B. Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung : 1996, hlm. 119.

1450 KUHPperdata. Menurut pasal 1457 KUHPperdata, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dari pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa unsur esensial dari perjanjian jual beli adalah “harga” dan “barang”.¹⁷

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa “jual beli adalah suatu persetujuan dimana suatu pihak mengikat diri untuk wajib menyerahkan suatu barang, dan pihak lain wajib membayar harga yang dimufakati mereka berdua”.¹⁸ Wolmar sebagaimana yang dikutip oleh Suryodiningrat menyatakan bahwa “jual beli adalah pihak yang satu penjual (*verkoper*) mengikatkan diri kepada pihak lainnya pembeli (*koper*) untuk memindahtangankan suatu benda dalam eigendom dengan memperoleh pembayaran dari orang yang disebut terakhir, sejumlah tertentu, berwujud uang”.¹⁹

2. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Jual Beli

Setiap perjanjian jual beli akan menimbulkan kewajiban dan hak bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu yaitu:

- a. Hak yang diberikan kepada penjual untuk mendesak pembeli membayar harga, tetapi penjual juga berkewajiban menyerahkan barangnya kepada pembeli.
- b. Hak yang diberikan kepada pembeli untuk mendesak kepada penjual untuk menyerahkan

barangnya yang telah dibeli, tetapi pembeli juga berkewajiban membayar harga pembelian tersebut.²⁰

Hak dan kewajiban Usaha Dagang Al Falah yaitu menyediakan beras hasil produksi dalam negeri dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam klausul perjanjian, lalu menyerahkan beras tersebut ke depan pintu gudang GBB Karangsentul dengan tepat waktu yaitu tidak lewat dari 30 hari. Wajib melaksanakan pengemasan sehingga beras terbungkus dengan baik, tertutup, tidak mudah terbuka dan rapi dengan ukuran isi beras ebanyak 15 kg per kemasan dan berat karung plastik paling sedikit sebesar 50 gram. Jika telah melaksanakan kewajibannya, maka berhak mendapatkan pembayaran sesuai harga yang telah ditetapkan.

Hak dan kewajiban Perum Bulog yaitu menyediakan kemasan berupa karung plastik baru dalam kondisi baik dan benang kuralon, yang diserahkan kepada Usaha Dagang Al Falah sebagai penjual setelah penjual menyerahkan jaminan 100% atas nilai kemasan. Kemudian berhak menolak dan mengembalikan beras kepada penjual untuk dilakukan perbaikan kualitas dan juga berhak mencairkan jaminan pelaksanaan menjadi milik Perum Bulog Banyumas apabila penjual melakukan wanprestasi. Apabila penjual telah melaksanakan kewajibannya, maka Perum Bulog Banyumas sebagai pembeli harus membayar harga beras sesuai kesepakatan sebelumnya.

¹⁷ Djaja S. Meliala, *Penuntun Praktis Hukum Perjanjian Khusus*, Nuansa Aulia, Bandung : 2010, hlm. 3.

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata tentang Perstujuan-Persestujuan Tertentu*, Sumur, Bandung : 1991, hlm. 17.

¹⁹ R.M, Suryodiningrat, *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*, Tarsito, Bandung : 1996, hlm. 14.

²⁰ CST. Kansil dan Christine S.T Kansil, *Modal Hukum Perdata (Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata)*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta : 2000, hlm. 238.

BAB III
GAMBARAN UMUM
LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Banyumas

1. Sejarah Banyumas

Kabupaten Banyumas merupakan sebuah Kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Ibukotanya adalah Kota Purwokerto. Kabupaten Banyumas berdiri pada tahun 1582, tepatnya pada hari Jum`at Kliwon tanggal 6 April 1582 Masehi, atau bertepatan tanggal 12 Robiul Awwal 990 Hijriyah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 2 tahun 1990.

Sejarah Kabupaten Banyumas tidak terlepas dari pendirinya yaitu Raden Joko Kahiman yang kemudian menjadi Bupati yang pertama dikenal dengan julukan atau gelar Adipati Marapat . Riwayat singkatnya diawali dari jaman Pemerintahan Kesultanan Pajang, di bawah Raja Sultan Hadiwijaya. Pada saat itu telah terjadi suatu peristiwa yang menimpa diri (kematian) Adipati Wirasaba ke VI (Warga Utama ke I) dikarenakan kesalahan paham dari Kanjeng Sultan pada waktu itu, sehingga terjadi musibah pembunuhan di Desa Bener, Kecamatan Lowano, Kabupaten Purworejo (sekarang) sewaktu Adipati Wirasaba dalam perjalanan pulang dari pisowanan ke Paiang. Dari peristiwa tersebut untuk menebus kesalahannya maka Sultan Pajang, memanggil putra Adipati Wirasaba namun tiada yang berani menghadap.

Kemudian salah satu diantaranya putra menantu yang memberanikan diri menghadap dengan catatan apabila nanti mendapatkan murka akan dihadapi sendiri, dan apabila mendapatkan anugerah/kemurahan putra-putra yang lain tidak boleh iri

hati. Lalu ternyata diberi anugerah diwisuda menjadi Adipati Wirasaba ke VII. Semenjak itulah putra menantu yaitu R. Joko Kahiman menjadi Adipati dengan gelar Adipati Warga Utama II.

B. Gambaran Umum Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Wilayah IV Banyumas

1. Sejarah Perum Bulog

Sejarah perkembangan Bulog tidak terlepas dari sejarah lembaga pangan di Indonesia sejak zaman sebelum kemerdekaan sampai pemerintahan sekarang ini. Secara umum tugas lembaga pangan tersebut adalah untuk menyediakan pangan bagi masyarakat pada harga yang terjangkau diseluruh daerah serta mengendalikan harga pangan di tingkat produsen dan konsumen. Instrumen untuk mencapai tujuan tersebut dapat berubah sesuai kondisi yang berkembang.

Campur tangan pemerintah dalam komoditas beras diawali sejak Maret 1933 yaitu di zaman pemerintahan Belanda. Saat itu untuk pertama kalinya pemerintah Belanda mengatur kebijakan perberasan, yaitu dengan menghapus impor beras secara bebas dan membatasi impor melalui sistem lisensi. Latar belakang ikut campurnya pemerintah Belanda dalam perberasan waktu itu adalah karena terjadinya fluktuasi harga beras yang cukup tajam yaitu tahun 1919-1920 dan sempat merosot tajam pada tahun 1930, sehingga petani mengalami kesulitan untuk membayar pajak.

Menjelang pecahnya Perang Dunia II, pemerintah Belanda memandang perlu untuk secara resmi dan permanen mendirikan suatu lembaga pangan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Beras oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional Wilayah IV Banyumas dengan Usaha Dagang Al Falah

Pada awalnya Usaha Dagang Al Falah yang ingin melaksanakan Perjanjian Jual Beli beras mengajukan permohonan kontrak kepada Perum Bulog Banyumas. Lalu surat permohonan tersebut diserahkan kepada Kepala Sub Divisi Regional untuk diterima atau tidak. Jika sudah diterima maka Usaha Dagang Al Falah akan berurusan dengan Kepala Seksi Pengadaan Beras. Nama Usaha Dagang Al Falah yang telah lulus persyaratan akan diberikan ke pusat. Perum Bulog Pusat membuat format isi perjanjian lalu diberikan lagi ke Perum Bulog Banyumas. Berdasarkan surat permohonan yang disetujui oleh Kepala Sub Divisi Regional, akan dibuat surat perjanjian oleh Kepala Seksi Pengadaan Beras untuk dijalankan dengan Usaha Dagang Al Falah tentang Perjanjian Jual Beli (PJB) Beras. Surat perjanjian ini akan menjadi bahan untuk pihak di gudang menerima barang (GD1M) dari Usaha Dagang Al Falah tersebut.²¹

Perum Bulog Banyumas dan Usaha Dagang Al Falah membuat akta perjanjian tersebut yang memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak dan ketentuan pembayaran serta sanksi-sanksi apabila terjadi wanprestasi. Jadi di tahun 2017, Usaha Dagang Al Falah adalah salah satu mitra kerja yang melakukan Perjanjian Jual Beli beras dengan Perum Bulog Banyumas.

²¹ Wawancara dengan Ibu Rahma Fiqri Nur Ihsani, Staf Pengadaan Beras, Hari Kamis, Tanggal 20 Juni, 2019, bertempat di Kantor Perum Bulog Banyumas.

Faktor-faktor diatas adalah penyebab terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh Usaha Dagang Al Falah sehingga menjadi terlambat menyerahkan beras dan beras yang diserahkan tidak sesuai kuantitas dan kualitas beras yang diperjanjikan. Dengan keadaan seperti ini, Usaha Dagang Al Falah mengesampingkan kewajibannya terhadap perjanjian yang telah disepakati, lalu memilih untuk menjual berasnya ke pasar dan bukan ke Perum Bulog Banyumas demi untuk mendapatkan keuntungan lebih. Mengenai dana operasional Usaha Dagang Al Falah yang masih kurang mengakibatkan proses Perjanjian Jual Beli tersebut menjadi terhambat. Kemudian, dikarenakan hasil panen sedikit, maka pihak Usaha Dagang Al Falah menunggu jumlah beras yang sudah cukup banyak baru diserahkan. Ini merupakan salah satu hal penyebab terlambatnya penyerahan beras kepada Perum Bulog. Lalu juga ditambah faktor dari mesin yang mengalami kerusakan yang membuat proses pengolahan beras menjadi terhambat.

B. Upaya Penyelesaian Terjadinya Wanprestasi yang dilakukan oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik dengan Usaha Dagang Al Falah

Pada setiap pelaksanaan perjanjian kemungkinan akan timbulnya wanprestasi, seperti halnya dengan Perjanjian Jual Beli Beras antara Perum Bulog Banyumas dengan Usaha Dagang Al Falah. Pada wanprestasi debitur baru dianggap lalai yaitu ditandai dengan lewatnya waktu atau apabila sudah ada surat teguran pernyataan lalai dari pihak kreditur kepada debitur. Teguran tersebut dilakukan dalam tenggang waktu yang layak bagi debitur untuk memenuhi prestasinya. Tenggang waktu yang diberikan dilandasi atas asas iktikad baik.

Kedudukan tugas dan tanggung jawab SPI dituangkan dalam *Internal Audit Charter*, yaitu acuan kerja bagi para auditor internal SPI Perum bulog sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara profesional serta sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*). Sesuai ketentuan *Internal Audit Charter* dan Pedoman Pemeriksaan, pelaksanaan tugas pengawasan SPI didasarkan atas Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) yang kemudian atas hasilnya pengawasannya dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) dilaksanakan setiap tahun oleh personil SPI di Kantor Pusat maupun personil SPI di Kantor Wilayah Divisi Regional.

Mengenai penyelesaian dengan Usaha Dagang Al Falah yang melakukan wanprestasi terhadap Perum Bulog Banyumas, SPI mengadakan musyawarah. Mereka mengambil langkah negosiasi dengan tujuan agar masalah dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Dengan adanya musyawarah tersebut, pihak Perum Bulog Banyumas yang ditangani oleh personil SPI menanyakan apa saja penyebab Usaha Dagang Al Falah telah lalai atas kewajibannya, lalu mencari solusi agar permasalahan ini terselesaikan tanpa melalui jalur Pengadilan.²² Sistem penyelesaian seperti ini sangat baik diterapkan untuk menghindari permasalahan yang lebih rumit dan memerlukan waktu yang panjang untuk penyelesaiannya.

²² Wawancara dengan Ibu Rahma Fitri Nur Ihsani, Staf Pengadaan Beras, Hari Kamis, Tanggal 20 Juni, 2019, bertempat di Kantor Perum Bulog Banyumas.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara dan keterangan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan perjanjian jual beli beras antara Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional Wilayah IV Banyumas dengan Usaha Dagang Al Falah ditemukan beberapa wanprestasi dan faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi tersebut. Pertama, Usaha Dagang Al Falah tidak dapat menyerahkan objek perjanjian berupa beras pada masa kontrak sesuai waktu yang diperjanjikan sehingga terlambat menyerahkan objek perjanjian. Kedua, Usaha Dagang Al Falah tidak dapat menyerahkan beras hasil giling sesuai standar sehingga beras tersebut tidak diterima oleh Perum Bulog Banyumas. Faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi tersebut yaitu, harga beras di pasaran umum mengalami kenaikan, kekurangan dana operasional, hasil panen sedikit dan kerusakan mesin dan atau peralatan survei.
2. Berkaitan dengan faktor-faktor yang menyebabkan Usaha Dagang Al Falah melakukan wanprestasi, Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik Sub Divisi Regional Wilayah IV Banyumas telah melakukan berbagai upaya. Upaya penyelesaian terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli beras yang dilakukan oleh Perum Bulog Banyumas dengan Usaha Dagang Al Falah yaitu pertama memberikan perpanjangan waktu kepada Usaha Dagang Al Falah untuk memenuhi prestasinya.

Kedua, memberikan sanksi berupa klaim denda keterlambatan dalam masa perpanjangan Usaha Dagang Al Falah tetap tidak dapat berprestasi dengan baik. Ketiga, penyelesaian dilakukan secara internal melalui lembaga Satuan Pengawas Internal (SPI) yang dimiliki oleh Perum Bulog Banyumas.

B. Saran

Dari hasil kesimpulan yang telah penulis kemukakan di atas, maka saran penulis adalah sebagai berikut:

1. Pihak Usaha Dagang Al Falah harus benar-benar memahami apa saja hal yang telah disepakati di dalam surat perjanjian jual beli beras terhadap Perum Bulog Banyumas. Selain itu, Usaha Dagang Al Falah sebagai mitra kerja perjanjian jual beli beras harus memiliki iktikad baik saat melaksanakan kewajiban-kewajiban yang timbul dalam hubungan hukum dan mau bertanggung jawab atas kewajiban yang tidak dilaksanakan dengan semestinya dalam hal ini membayar ganti rugi kepada Perum Bulog Banyumas.
2. Dengan terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh Usaha Dagang Al Falah sebagai salah satu mitra kerja Perum Bulog, maka Perum Bulog Banyumas bisa menerapkan sistem perjanjian jual beli beras yang lebih efektif dan lebih cepat tanggap dalam mengambil tindakan tegas terhadap permasalahan wanprestasi ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali, Zainudin, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Asyhadie, Zaeni dan Arief Rahman, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Bachtiar, Maryati, 2007, *Hukum Perikatan*, Pusat Pengembangan Pendidikan, Universitas Riau, Pekanbaru.

Badruzaman, Mariam Darus, 1993, *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Alumni Bandung.

_____, dkk, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Budiono, Herlien. 2011, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Bruggink, J.J.H., dan B. Arief Sidharta, 1996, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Dasrol, 2017, *Hukum Ekonomi, Suatu Pengantar dalam Hukum Bisnis*, Alaf Riau, Pekanbaru.

Fuady, Munir, 2001, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 2002, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Harahap, M. Yahya, 1982, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.

Hasyim, Farida, 2011, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hernoko, Agus Yudha, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam*

- Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta.
- H.S, Salim, 2009, *Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* Sinar Grafika, Jakarta.
- Hutagalung, Sophar Maru, 2013, *Kontrak Bisnis di ASEAN (Pengaruh Sistem Hukum Common Law dan Civil Law)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jehani, Nana P., et.al, 2008, *50 Contoh Perjanjian (Kontrak)*, Forum Sahabat, Jakarta.
- Kansil, C. S. T., 1983, *Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta.
- _____, dan Christine S.T Kansil, 2000, *Modal Hukum Perdata (Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata)*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Khairandy, Ridwan, 2003, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Meliala, Djaja. S., 2010, *Penuntun Praktis Hukum Perjanjian Khusus*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Miru, Ahmadi, 2008, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Monahan, Geoff and David Barker, 2001, *Essential Contract Law*, Cavendish Publishing, Sydney.
- Muhammad, Abdul Kadir, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Patrik, Purwahid, 1994, *Dasar-dasar Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-Undang*, Mandar Maju, Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1991, *Hukum Perdata tentang Perstujuan-Perstujuan Tertentu*, Sumur, Bandung.
- Rato, Dominikus, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Rusli, Hardijan, 1996, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Satrio, J., 1992, *Hukum Perjanjian*, Aditya Bhakti, Bandung.
- Sawit, M. Husein, dkk, 2003, *BULOG Baru: Menyelaraskan Kegiatan dan Memantapkan Tugas Nasional*, Puslitbang Bulog.
- Sjahdeini, Sutan Remi, 2009, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Soekanto, Soejono, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Yogyakarta.

Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta.

_____, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, P. Intermedia, Jakarta.

Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Prenada Media, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Supramono, Gatot, *Kedudukan Perusahaan Sebagai Subjek dalam Gugatan Perdata di Pengadilan*, Rineka Cipta, Jakarta.

Suryodiningrat, R.M, 1996, *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*, Tarsito, Bandung.

Syahrani, Riduan, 2000, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung.

Syaifuddin, Muhammad, 2012, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filasafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, CV. Mandar Maju, Bandung.

Tutik, Titik Triwulan, 2006, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Widjaya, I. G Rai, 2003, *Merancang Suatu Kontrak, Contract Drafting Teori dan Praktek*, Megapoin, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus/Makalah

Alan S. Gutterman, Supreme Court of The United States, *As Agent for the Bank Parties to The Credit Agreement Referred to Below 1896*, *Jurnal West Law* diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/erpustakaan/#>, pada tanggal 4 September 2017 dan diterjemahkan melalui *Google Translate*.

Caroline Edward, *Freedom Of Contract And Fundamental Fairness For Individual Parties: The Tug Of War Continues*”, *Jurnal UMKC Law Review*, University of Missouri, 77 UMKC L. Rev. 647, Spring 2009, diunduh dari <http://www.westlaw.com>.

Kamus Hukum Belanda-Indonesia, 2005, Sinar Grafika, Jakarta.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Gardner, Union President Wesley A. Pummill. “*Relationship of this Agreement To Bureau Policies, Regulations, And, Practices*”. Artikel pada *Jurnal Westlaw Arbitrator’s Awards*, The Federal Correctional Complex (FCC) in Terre Haute, Indiana. 2012.

Hengki Firmanda S., “*Hakikat Kontrak Menurut Roscoe Pound dan Relevansinya Terhadap Kontrak yang Berkaitan dengan Lingkungan Hidup*”. *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau*, Terbitan 1.

Novina Sri Indiraharti. “Aspek Keabsahan Perjanjian dalam Hukum Kontrak (Suatu Perbandingan Antara Indonesia dan Korea Selatan)”. Artikel Pada Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 4 No. 1 Tahun 2014.

<http://digilib.unila.ac.id/4718/11/BAB%2011.pdf>, diakses, tanggal, 2 Agustus 2018.

R.M Panggabean. “Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku”. Artikel Pada Jurnal Hukum No. 4 Vol. 17 Oktober 2010 : 651-667.

<http://kalibagorkec.banyumaskab.go.id/read/15894/sejarah-banyumas>, diakses, tanggal, 27 Juni 2014.

Westlaw, 2017, “Chapter I Contract Theory, Remedial Choices, and Relationships”, Jurnal Modern Law of Contract, 1:3 Contract as Moral Duty.

Wojowasito, 1997, *Kamus Umum Bahasa Belanda*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve , Jakarta.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum.

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Pengadaan Gabah atau Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah.

Keputusan Direksi Perum Bulog , Tentang Kebijakan Umum Pengembangan Usaha KU-01/DS200/07/2004, tanggal, 8 Juli 2004.

D. Website

http://bumn.go.id/upload/download_img/file_download/, diakses, tanggal 2 Januari 2018.